



Memahami Pancasila dalam Algoritma Media Sosial: Analisis Wacana Digital Tentang Ideologi Bangsa

Ahmad Muhammad Mustain Nashoha¹, Ashfiyah Nur Atqiyah², Miftahul Mujahidin³,
Raynar Andaru Ahnaf⁴, Nafilah Zahratun jannah⁵,

¹⁻⁵ Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id¹, ashfiy.anura@gmail.com², miftahulm767@gmail.com³,
andaruahnaf@gmail.com⁴, fielahzahra875@gmail.com⁵,

Abstract The evolution of social media and its algorithms has transformed the dissemination of Pancasila as Indonesia's national ideology. This study aims to analyze the representation of Pancasila in algorithmically curated digital discourse and its impact on public understanding. A qualitative approach, combining digital discourse analysis and netnography, was applied to examine content on Twitter, Facebook, Instagram, and YouTube. Findings reveal the dual role of social media algorithms: while facilitating educational content on Pancasila (e.g., religious tolerance, human rights campaigns, and nationalism), they also amplify polarizing content, hoaxes, and hate speech that contradict Pancasila values. Analysis of Pancasila's five principles shows that conflict-driven content (e.g., ethnic-religious issues) gains higher virality due to algorithms' prioritization of engagement metrics. The filter bubble and echo chamber phenomena exacerbate discourse fragmentation, hindering inclusive dialogue about national ideology. The study concludes that Pancasila-based digital literacy, algorithmic transparency, and multistakeholder collaboration are critical to optimizing social media's role in strengthening national identity. Policy recommendations include integrating "social cohesion" parameters into algorithm design and regulating content to uphold diversity.

Keywords : Pancasila, Social Media Algorithms, Digital Discourse, National Ideology, Polarization.

Abstrak Perkembangan media sosial dan algoritmanya telah mengubah dinamika penyebaran nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Penelitian ini bertujuan menganalisis representasi Pancasila dalam wacana digital yang dikurasi algoritma media sosial serta dampaknya terhadap pemahaman masyarakat. Metode kualitatif dengan pendekatan analisis wacana digital dan netnografi digunakan untuk mengkaji konten di platform *Twitter*, *Facebook*, *Instagram*, dan *YouTube*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma media sosial bersifat ambivalen: di satu sisi, memfasilitasi penyebaran konten edukatif tentang Pancasila (seperti toleransi beragama, kampanye HAM, dan nasionalisme); di sisi lain, mengamplifikasi konten polarisasi, hoaks, dan ujaran kebencian yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Analisis terhadap lima sila Pancasila mengungkap bahwa konten bernuansa konflik (misalnya isu SARA) cenderung lebih viral karena prioritas algoritma pada *engagement metrics*. Fenomena *filter bubble* dan *echo chamber* memperparah fragmentasi wacana, menghambat dialog inklusif tentang ideologi bangsa. Penelitian ini menyimpulkan perlunya literasi digital berbasis Pancasila, transparansi algoritma, dan kolaborasi multistakeholder untuk mengoptimalkan peran media sosial dalam memperkuat identitas nasional. Rekomendasi kebijakan mencakup integrasi parameter "kohesi sosial" dalam desain algoritma serta regulasi konten yang pro-kebhinekaan.

Kata Kunci : Pancasila, Algoritma Media Sosial, Ideologi Bangsa, Polarisasi.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah mengubah cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan menyebarkan informasi (Virza et al., 2024). Media sosial tidak hanya menjadi platform untuk berbagi konten pribadi, tetapi juga menjadi ruang publik di mana ideologi, nilai-nilai, dan pemikiran kolektif diperdebatkan dan disebarluaskan. Dalam konteks Indonesia, Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki peran sentral dalam membentuk identitas nasional dan mempersatukan keberagaman (Melsya Dwi Putri et al., 2024). Namun, dengan hadirnya algoritma media sosial yang cenderung memprioritaskan konten viral dan sensasional, nilai-nilai Pancasila seringkali terpinggirkan atau bahkan

disalahartikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana Pancasila dapat dipahami dan diintegrasikan dalam algoritma media sosial yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat?

Algoritma media sosial dirancang untuk memengaruhi apa yang dilihat, dibaca, dan diinteraksikan oleh pengguna. Sistem ini bekerja dengan menganalisis preferensi pengguna, mengidentifikasi pola perilaku, dan menyajikan konten yang dianggap relevan. Namun, algoritma ini seringkali tidak mempertimbangkan nilai-nilai ideologis seperti Pancasila, yang seharusnya menjadi landasan moral dan etika dalam berinteraksi di ruang digital. Akibatnya, konten yang mengandung nilai-nilai kebangsaan, persatuan, dan keadilan sosial seringkali kalah bersaing dengan konten yang lebih provokatif atau kontroversial (Ulfa et al., 2024). Fenomena ini menuntut analisis mendalam tentang bagaimana Pancasila dapat diintegrasikan ke dalam sistem algoritma media sosial tanpa mengurangi esensi dan relevansinya.

Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki lima sila yang mencakup nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini seharusnya menjadi panduan dalam berinteraksi di media sosial, terutama dalam menghadapi tantangan seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi sosial (Amaries et al., n.d.). Namun, realitasnya, media sosial justru sering menjadi sarana untuk menyebarkan konten yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini terjadi karena algoritma media sosial lebih mengutamakan engagement (interaksi) daripada kualitas konten. Oleh karena itu, penting untuk memikirkan bagaimana algoritma ini dapat diarahkan untuk mempromosikan nilai-nilai Pancasila secara lebih efektif (Atqiya, Muhamad, Nasoha, Ramadhani, et al., 2024).

Analisis wacana digital tentang Pancasila dalam konteks media sosial menjadi penting untuk memahami bagaimana ideologi ini dipahami, diinterpretasikan, dan disebarluaskan di ruang digital. Wacana digital tidak hanya mencakup teks tertulis, tetapi juga gambar, video, dan interaksi pengguna yang membentuk makna kolektif. Dalam konteks ini, Pancasila tidak hanya dipahami sebagai doktrin statis, tetapi sebagai ideologi yang hidup dan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman (Muhamad, Nasoha, Atqiya, et al., 2024). Namun, tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan tidak terdistorsi oleh dinamika media sosial yang cepat dan seringkali tidak terkendali.

Beberapa penelitian telah mengkaji hubungan antara media sosial dan ideologi, termasuk bagaimana platform digital memengaruhi pemahaman dan penyebaran nilai-nilai kebangsaan. Di Indonesia, beberapa akademisi telah mulai mengeksplorasi hubungan antara Pancasila dan media sosial. (Abdullah & Basuki, 2022) mengatakan bahwa media sosial memiliki potensi besar untuk mempromosikan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga memiliki risiko

besar untuk mendistorsinya. Penelitian ini menekankan pentingnya literasi digital dan pendidikan Pancasila untuk mengatasi tantangan ini. Selain itu, peran algoritma dalam membentuk wacana digital tentang Pancasila dan menyarankan perlunya regulasi yang lebih ketat untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak terpinggirkan (Virza et al., 2024).

Namun, masih ada kesenjangan dalam penelitian tentang bagaimana algoritma media sosial dapat dirancang untuk mempromosikan nilai-nilai Pancasila secara efektif. Kebanyakan penelitian lebih fokus pada dampak negatif media sosial terhadap Pancasila, daripada mencari solusi untuk mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam sistem algoritma (Muhamad et al., 2025). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis bagaimana Pancasila dapat dipahami dan diintegrasikan ke dalam algoritma media sosial, serta bagaimana wacana digital tentang Pancasila dapat dikembangkan untuk memperkuat identitas nasional (Namira et al., 2022).

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mendasar tentang bagaimana Pancasila dapat dipahami dan diintegrasikan ke dalam algoritma media sosial. Dengan menganalisis wacana digital tentang Pancasila, penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan dan peluang untuk mempromosikan nilai-nilai ini di ruang digital. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi praktis untuk mengoptimalkan peran media sosial dalam memperkuat identitas nasional dan mempromosikan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan ilmu sosial dan humaniora, khususnya dalam konteks Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan analisis wacana digital untuk mengkaji pola interaksi dan persepsi masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila di media sosial (Rashid, 2022). Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai platform seperti *Twitter*, *Facebook*, *Instagram*, dan *YouTube*. Data dikumpulkan melalui teknik *netnografi scraping* data digital, serta wawancara mendalam dengan ahli komunikasi digital dan pengguna aktif media sosial. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis artikel jurnal, berita online, serta kebijakan yang berkaitan dengan Pancasila dan regulasi media sosial (Abdillah Fudholi et al., 2024).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis untuk memahami konstruksi Pancasila dalam diskursus digital. Selain itu, teknik analisis algoritma digunakan untuk melihat bagaimana algoritma media sosial mengatur penyebaran informasi

mengenai Pancasila, serta sentiment analysis untuk mengidentifikasi kecenderungan opini publik, apakah bersifat positif, negatif, atau netral.

Untuk memastikan validitas data, dilakukan triangulasi dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber serta uji keterulangan untuk mengevaluasi konsistensi temuan. Dalam prosesnya, penelitian ini juga mematuhi etika penelitian digital dengan melakukan *anonimisasi* data dan mendapatkan izin eksplisit dari narasumber yang diwawancarai. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana algoritma media sosial berperan dalam memediasi wacana Pancasila dalam ruang digital, serta dampaknya terhadap pemahaman masyarakat mengenai ideologi bangsa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Representasi nilai-nilai pancasila dalam wacana digital adalah sebagai berikut:

- Ketuhanan yang Maha Esa
 - Penyebaran konten keagamaan yang menekankan toleransi dan kerukunan.

Pada sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, yang artinya Indonesia adalah negara yang monotheisme yaitu yang percaya akan adanya Tuhan dan bisa disebut negara yang berlandaskan agama. Indonesia memiliki keanekaragaman dalam beragama yang memiliki enam agama yang dianut oleh manusia, artinya setiap orang memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda. Pada sila pertama ini, memiliki arti falsafah yang harus dapat menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama (Najmi et al., 2024).
 - Potensi penyalahgunaan media sosial untuk menyebarkan ujaran kebencian berbasis agama.

Media sosial menjadi ruang bebas bagi masyarakat untuk berpendapat, tetapi kebebasan ini sering disalahgunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian berbasis agama. Dalam konteks sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa seharusnya setiap individu menghormati keberagaman keyakinan dan menjalankan kehidupan beragama dengan damai (Najmi et al., 2024). Namun, banyak oknum yang justru menggunakan media sosial untuk menyerang kelompok lain dengan dalih perbedaan kepercayaan. Akibatnya, media sosial menjadi ladang subur bagi provokasi dan konflik antarumat beragama.

Penyalahgunaan media sosial untuk menyebarkan kebencian berbasis agama dapat berawal dari misinformasi atau propaganda yang sengaja dibuat untuk memecah belah masyarakat. Konten yang mengandung ujaran kebencian sering kali dikemas

dalam bentuk narasi emosional yang membangkitkan amarah, sehingga mudah menyebar luas. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan toleransi dan persatuan dalam keberagaman (Kurnianto & Abdusshomad, 2024). Jika dibiarkan, situasi ini dapat merusak harmoni sosial dan memicu konflik berkepanjangan.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kesadaran bersama dalam menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Pemerintah memiliki peran dalam menegakkan regulasi yang tegas terhadap penyebaran ujaran kebencian berbasis agama. Selain itu, masyarakat juga harus kritis dalam menerima informasi serta tidak mudah terpancing provokasi. Pendidikan mengenai literasi digital dan toleransi beragama perlu ditanamkan sejak dini agar masyarakat semakin sadar akan bahaya ujaran kebencian.

Mewujudkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam era digital berarti mengutamakan sikap saling menghormati dan menjaga keharmonisan antarumat beragama, baik di dunia nyata maupun di media sosial (Atqiya, Muhamad, Nasoha, & Rohmawati, 2024). Setiap individu bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan digital yang damai dengan menyebarkan pesan-pesan positif. Dengan begitu, media sosial dapat menjadi alat untuk mempererat persaudaraan, bukan menjadi sarana yang memperburuk perpecahan.

- Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
 - Kampanye digital yang mendukung hak asasi manusia dan kesetaraan.

Di era digital, kampanye yang mendukung hak asasi manusia dan kesetaraan semakin mudah dijangkau oleh masyarakat luas. Nilai-nilai dalam sila kedua Pancasila, *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, dapat diwujudkan melalui berbagai platform digital seperti media sosial, situs web, dan petisi daring. Dengan teknologi yang semakin berkembang, kesadaran akan pentingnya menghormati martabat setiap individu dapat disebarluaskan secara lebih efektif. Kampanye digital dapat berupa edukasi mengenai hak asasi manusia, kisah inspiratif dari berbagai komunitas, hingga ajakan untuk berpartisipasi dalam aksi solidaritas (Syahputra¹ et al., 2023).

Media sosial menjadi alat yang kuat dalam menyuarkan isu ketidakadilan, seperti diskriminasi, perundungan, dan pelanggaran hak-hak dasar. Dengan berbagi informasi yang benar dan positif, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya kesetaraan bagi semua orang tanpa memandang ras, agama, atau status sosial. Selain edukasi, kampanye digital juga dapat mendorong perubahan nyata melalui petisi daring

dan penggalangan dana untuk membantu korban ketidakadilan (Legito et al., 2023). Dengan banyaknya pengguna internet, partisipasi dalam aksi sosial dapat dilakukan secara lebih luas dan cepat. Kampanye yang konsisten dan berbasis data dapat menekan pihak berwenang untuk mengambil tindakan nyata dalam mewujudkan keadilan dan kemanusiaan yang lebih baik.

Dalam menjalankan kampanye digital, penting untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip etika dan tanggung jawab dalam berbagi informasi. Penyebaran hoaks atau ujaran kebencian justru dapat merusak tujuan utama dari kampanye tersebut. Dengan sikap yang beradab dan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, kita dapat membangun dunia digital yang lebih inklusif dan mencerminkan semangat sila kedua Pancasila.

- Penyebaran hoaks dan disinformasi yang dapat mencederai nilai kemanusiaan.

Sila kedua Pancasila, *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab* menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, serta sikap beradab dalam kehidupan bermasyarakat. Sayangnya, di era digital saat ini, penyebaran hoaks dan disinformasi menjadi ancaman nyata yang dapat mencederai nilai-nilai tersebut. Informasi palsu yang disebarkan tanpa verifikasi dapat memicu ketakutan, kebencian, bahkan perpecahan di tengah masyarakat. Hal ini bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang seharusnya menumbuhkan sikap saling menghormati dan mempererat persatuan (Agustina, 2023).

Hoaks dan disinformasi sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tanpa memikirkan dampaknya terhadap orang lain. Korban dari informasi palsu ini bisa siapa saja, mulai dari individu, kelompok masyarakat, hingga bangsa secara keseluruhan (Anah & Saputra, 2024). Dalam banyak kasus, hoaks yang berkaitan dengan isu sosial, politik, atau kesehatan telah menyebabkan keresahan dan bahkan tindakan diskriminatif. Jika dibiarkan, hal ini akan mengikis rasa kemanusiaan dan menciptakan lingkungan yang penuh dengan prasangka serta ketidakadilan.

Mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam konteks ini berarti kita harus lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Masyarakat harus mengembangkan kebiasaan berpikir kritis, mencari sumber yang kredibel, serta tidak mudah terprovokasi oleh berita yang belum terbukti kebenarannya. Selain itu, pemerintah dan platform media sosial juga memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan penyebaran informasi palsu dengan menerapkan regulasi yang lebih

ketat. Upaya bersama ini penting agar ruang digital tetap sehat dan tidak merusak nilai kemanusiaan (Hardiyanti, 2021).

Sebagai individu yang menjunjung tinggi nilai Pancasila, kita harus berperan aktif dalam melawan hoaks dan disinformasi. Dengan menyebarkan kebenaran dan menolak ikut serta dalam penyebaran berita palsu, kita turut menjaga keadaban dan keadilan dalam kehidupan sosial. Kesadaran akan pentingnya informasi yang benar adalah bentuk nyata dari sikap beradab dan bertanggung jawab. Jika setiap orang menjalankan peran ini, maka cita-cita bangsa yang berlandaskan kemanusiaan yang adil dan beradab dapat terwujud dengan lebih baik.

- Persatuan Indonesia
 - Gerakan media sosial yang memperkuat nasionalisme dan kebanggaan terhadap budaya lokal.

Di era digital saat ini, media sosial menjadi salah satu alat paling efektif untuk menyebarkan nilai-nilai persatuan dan nasionalisme. Sila ketiga Pancasila, *Persatuan Indonesia*, menekankan pentingnya kebersamaan di tengah keberagaman budaya, suku, dan agama. Melalui platform seperti *Instagram*, *TikTok*, dan *Twitter*. Masyarakat dapat berbagi informasi dan konten yang memperkenalkan kekayaan budaya Nusantara. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi tempat hiburan, tetapi juga sarana edukasi yang memperkuat rasa cinta terhadap tanah air (Najmi et al., 2024).

Gerakan media sosial yang mengangkat budaya lokal semakin banyak bermunculan dan mendapat perhatian luas. Kampanye seperti, bangga buatan Indonesia dan cinta batik mengajak masyarakat untuk lebih menghargai produk dalam negeri. Selain itu, konten kreator yang membahas sejarah, kuliner, hingga tarian tradisional turut berperan dalam melestarikan warisan budaya. Dengan adanya dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, gerakan ini mampu membangun kesadaran akan pentingnya menjaga identitas bangsa (Maliki, 2024).

Selain meningkatkan kebanggaan terhadap budaya lokal, media sosial juga dapat memperkuat rasa persatuan antarwarga negara. Melalui interaksi digital, masyarakat dari berbagai daerah dapat bertukar informasi dan pengalaman tentang tradisi masing-masing. Hal ini membantu mengurangi kesalahpahaman dan mempererat hubungan sosial yang berlandaskan toleransi dan kebersamaan. Dalam jangka panjang, persatuan yang kuat dapat mendorong kemajuan bangsa di berbagai bidang.

Agar gerakan ini terus berkembang, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, komunitas, dan individu. Pemerintah dapat memberikan fasilitas dan apresiasi bagi para konten kreator yang mengangkat budaya lokal. Sementara itu, masyarakat dapat berkontribusi dengan aktif membagikan dan mendukung konten positif tentang Indonesia. Dengan kolaborasi yang solid, media sosial bisa menjadi kekuatan besar dalam mewujudkan persatuan dan kebanggaan nasional yang semakin kokoh.

- Polarisasi politik yang berpotensi melemahkan persatuan.

Persatuan Indonesia sebagai sila ketiga Pancasila menegaskan pentingnya persatuan di tengah keberagaman. Realitanya, politik saat ini menunjukkan bahwa polarisasi semakin tajam, terutama menjelang pemilu atau isu-isu sensitif. Polarisasi ini seringkali diperparah oleh propaganda, misinformasi, serta fanatisme politik yang mengabaikan kepentingan bersama. Jika dibiarkan, perpecahan akibat perbedaan pandangan politik bisa menggerus nilai-nilai kebangsaan yang telah dibangun selama ini.

Polarisasi politik berpotensi melemahkan persatuan ketika masyarakat lebih mengutamakan identitas kelompok dibandingkan rasa kebangsaan. Konflik yang muncul bukan sekadar perbedaan pendapat, tetapi berkembang menjadi kebencian terhadap pihak lain. Hal ini dapat menimbulkan segregasi sosial, bahkan menghambat kerja sama dalam berbagai aspek kehidupan. Padahal, keberagaman pandangan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemicu perpecahan.

Penting bagi masyarakat untuk kembali pada nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga, sebagai landasan dalam menyikapi perbedaan. Sikap saling menghormati, berdialog dengan kepala dingin, serta menjunjung kepentingan nasional harus dikedepankan. Pemerintah, media, dan tokoh masyarakat juga memiliki peran penting dalam meredam polarisasi dengan memberikan edukasi politik yang sehat dan tidak memprovokasi perpecahan.

Persatuan Indonesia hanya bisa terwujud jika seluruh elemen bangsa bersedia mengutamakan kebersamaan di atas kepentingan kelompok. Perbedaan pilihan politik adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk saling bermusuhan. Dengan menjaga sikap toleran dan semangat persatuan, Indonesia dapat tetap kokoh menghadapi tantangan zaman.

- Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan
 - Partisipasi digital dalam demokrasi melalui diskusi publik dan petisi *online*.

Di era digital, partisipasi masyarakat dalam demokrasi semakin berkembang melalui berbagai platform online. Prinsip sila keempat Pancasila, yaitu *Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan* menekankan pentingnya musyawarah dan perwakilan dalam pengambilan keputusan. Teknologi digital kini memungkinkan warga untuk menyuarakan pendapatnya secara lebih luas melalui diskusi publik dan petisi online. Dengan adanya ruang digital, demokrasi menjadi lebih inklusif dan partisipatif, memungkinkan berbagai kelompok masyarakat untuk berkontribusi dalam pengambilan kebijakan.

Diskusi publik dalam platform digital, seperti media sosial dan forum daring, menjadi sarana bagi masyarakat untuk bertukar pendapat dan mencari solusi terhadap permasalahan sosial. Melalui diskusi ini, masyarakat dapat menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan berdialog dengan para pemangku kepentingan (Pratama, 2024). Kebebasan berpendapat dalam ruang digital ini mencerminkan semangat musyawarah yang ada dalam sila keempat. Namun, perlu diimbangi dengan sikap bijak dan bertanggung jawab agar diskusi tetap konstruktif dan tidak menimbulkan perpecahan.

Selain diskusi publik, petisi *online* juga menjadi alat yang efektif dalam menyuarakan aspirasi rakyat. Platform seperti *Change.org* dan berbagai situs petisi lokal memungkinkan masyarakat mengajukan dan mendukung tuntutan terhadap suatu kebijakan. Petisi yang mendapatkan banyak dukungan sering kali mampu menarik perhatian pemerintah atau lembaga terkait untuk mempertimbangkan perubahan kebijakan. Ini menunjukkan bahwa partisipasi digital dapat memperkuat prinsip perwakilan dalam demokrasi, di mana suara masyarakat dapat lebih didengar dan diperhitungkan.

Meskipun partisipasi digital membawa banyak manfaat, ada tantangan yang harus dihadapi, seperti penyebaran hoaks dan polarisasi opini. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki literasi digital yang baik agar dapat berkontribusi secara positif dalam demokrasi. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijaksana, partisipasi dalam diskusi publik dan petisi online dapat menjadi wujud nyata dari sila keempat Pancasila, yakni mewujudkan demokrasi yang berlandaskan kebijaksanaan dan permusyawaratan demi kepentingan bersama.

- Tantangan dalam membedakan opini berbasis fakta dengan propaganda politik.

Dalam sistem demokrasi Pancasila, sila keempat menekankan pentingnya musyawarah dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Namun, tantangan

besar yang dihadapi masyarakat adalah membedakan antara opini berbasis fakta dan propaganda politik. Di era digital, informasi menyebar dengan cepat, sering kali tanpa verifikasi yang memadai. Akibatnya, banyak orang terjebak dalam opini yang tidak didukung oleh data valid, tetapi justru dipengaruhi oleh narasi yang menguntungkan kelompok tertentu.

Propaganda politik sering kali dikemas dengan teknik persuasif yang memanfaatkan emosi masyarakat, seperti rasa takut, kebencian, atau nasionalisme berlebihan. Berbeda dengan opini berbasis fakta yang bersumber dari data dan analisis objektif, propaganda cenderung menyeleksi atau memelintir informasi untuk membentuk persepsi tertentu (Pratama, 2024). Media sosial menjadi ladang subur bagi penyebaran propaganda, terutama dengan hadirnya bot dan akun anonim yang memperkuat narasi tertentu. Hal ini dapat membentuk polarisasi di tengah masyarakat dan menghambat diskusi yang sehat.

Salah satu tantangan terbesar dalam membedakan keduanya adalah rendahnya literasi media dan digital di kalangan masyarakat. Banyak orang tidak terbiasa melakukan pengecekan terhadap sumber informasi sebelum mempercayainya. Selain itu, algoritma media sosial cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna, sehingga menciptakan efek gelembung informasi (filter bubble). Akibatnya, masyarakat lebih mudah menerima informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka tanpa mempertanyakan keabsahannya.

Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya bersama dalam meningkatkan literasi media dan berpikir kritis. Masyarakat harus diajarkan untuk menganalisis sumber informasi, membandingkan berbagai perspektif, dan mengenali teknik manipulasi dalam propaganda. Pemerintah, media, dan lembaga pendidikan juga memiliki peran penting dalam menyediakan informasi yang transparan dan dapat dipercaya. Dengan demikian, nilai-nilai demokrasi dalam sila keempat dapat tetap dijunjung tinggi, sehingga keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat secara objektif dan adil.

- Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
 - Kampanye kesadaran sosial mengenai kemiskinan, pendidikan, dan keadilan ekonomi.

Sila kelima Pancasila, *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, menegaskan pentingnya pemerataan kesejahteraan tanpa diskriminasi. Dalam realitas sosial, masih banyak ketimpangan dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kampanye kesadaran sosial menjadi salah

satu langkah strategis untuk membangun kepedulian bersama terhadap permasalahan kemiskinan dan keadilan ekonomi. Dengan meningkatnya kesadaran, masyarakat dapat lebih aktif berkontribusi dalam upaya pemerataan kesejahteraan.

Kemiskinan masih menjadi tantangan utama yang menghambat keadilan sosial di Indonesia. Melalui kampanye yang edukatif dan inspiratif, masyarakat dapat memahami akar masalah kemiskinan serta pentingnya dukungan bagi kelompok rentan. Kampanye ini bisa diwujudkan dalam bentuk diskusi publik, seminar, atau gerakan sosial yang mendorong solidaritas. Dengan demikian, kesadaran kolektif dapat mendorong kebijakan dan aksi nyata dalam membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Selain kemiskinan, pendidikan juga menjadi faktor kunci dalam mewujudkan keadilan sosial. Kampanye kesadaran sosial harus menyoroti pentingnya akses pendidikan yang setara bagi semua anak bangsa. Banyak anak dari keluarga kurang mampu yang kesulitan mendapatkan pendidikan berkualitas, sehingga perlu ada inisiatif bersama untuk menyediakan beasiswa, fasilitas belajar, dan program literasi. Pendidikan yang merata akan membuka peluang bagi generasi muda untuk meningkatkan taraf hidupnya dan berkontribusi pada pembangunan bangsa.

Di sisi lain, keadilan ekonomi harus diwujudkan melalui sistem yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Kampanye sosial dapat mendorong kesadaran tentang pentingnya ekonomi inklusif, seperti dukungan bagi usaha kecil dan pemberdayaan ekonomi desa. Dengan adanya kebijakan yang adil dan akses yang lebih luas terhadap sumber daya ekonomi, masyarakat dapat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Melalui kesadaran dan aksi nyata, sila kelima Pancasila dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

- Tantangan dalam menyaring konten yang benar-benar memperjuangkan keadilan sosial tanpa motif politik tersembunyi.

Sila kelima, *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, menegaskan pentingnya pemerataan kesejahteraan dan hak yang sama bagi setiap warga negara. Namun, dalam era digital, konsep keadilan sosial sering kali dimanfaatkan oleh berbagai pihak dengan agenda tertentu. Informasi yang beredar di media sosial dan platform berita tidak selalu murni memperjuangkan keadilan sosial, melainkan terkadang dibumbui kepentingan politik yang terselubung. Hal ini membuat masyarakat sulit memilah mana konten yang benar-benar berorientasi pada kepentingan bersama dan mana yang hanya alat propaganda.

Tantangan terbesar dalam menyaring konten terkait keadilan sosial adalah adanya bias informasi yang disebarkan oleh berbagai pihak. Banyak narasi yang dikemas dengan bahasa persuasif dan emosional sehingga masyarakat mudah terpengaruh tanpa melakukan verifikasi. Media, influencer, dan bahkan organisasi tertentu kerap memiliki agenda yang dapat membelokkan makna keadilan sosial demi kepentingan politik mereka. Akibatnya, isu-isu sosial yang seharusnya berfokus pada kesejahteraan rakyat sering kali dimanfaatkan untuk polarisasi atau penggalangan dukungan terhadap kelompok tertentu.

Untuk menghadapi tantangan ini, masyarakat perlu mengembangkan literasi digital dan kritis dalam mengonsumsi informasi. Memeriksa sumber berita, membandingkan dengan referensi terpercaya, serta memahami konteks suatu isu menjadi langkah penting dalam menyaring konten yang benar-benar memperjuangkan keadilan sosial. Selain itu, peran akademisi, jurnalis independen, dan tokoh masyarakat yang netral sangat dibutuhkan untuk memberikan perspektif objektif. Dengan demikian, penyebaran informasi mengenai keadilan sosial dapat lebih murni dan tidak terdistorsi oleh kepentingan politik tertentu.

Pemerintah dan platform digital juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa konten yang beredar tidak hanya akurat tetapi juga tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik yang merugikan masyarakat. Regulasi yang ketat terhadap hoaks dan misinformasi dapat membantu mengurangi penyalahgunaan isu keadilan sosial. Selain itu, mendorong diskusi publik yang sehat dan transparan dapat menjadi solusi agar keadilan sosial benar-benar terwujud bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila (Atqiya, Muhamad, Nasoha, & Rohmawati, 2024).

Pembahasan

Algoritma media sosial dan dinamika wacana digital. Media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, dan *TikTok* menggunakan algoritma yang berfungsi untuk menyesuaikan konten dengan preferensi pengguna. Algoritma ini beroperasi berdasarkan:

- *Personalized Content*: Konten yang muncul di beranda pengguna disesuaikan dengan minat dan interaksi sebelumnya.

Di era digital, *personalized content* menjadi strategi utama dalam menyajikan informasi yang relevan bagi pengguna (Jamilah et al., 2024). Konten yang muncul di beranda setiap individu disesuaikan berdasarkan minat, riwayat pencarian, serta interaksi sebelumnya. Algoritma canggih mempelajari pola perilaku pengguna untuk menyajikan konten yang paling

menarik dan sesuai. Hal ini bertujuan meningkatkan keterlibatan serta pengalaman pengguna dalam mengonsumsi informasi.

Personalisasi konten diterapkan di berbagai platform seperti media sosial, layanan *streaming*, hingga *e-commerce*. *Instagram*, *YouTube*, dan *TikTok*, misalnya, menggunakan algoritma untuk menampilkan konten yang sering dilihat atau disukai pengguna. Begitu pula dengan *Netflix* dan *Spotify*, yang merekomendasikan film atau lagu berdasarkan riwayat tontonan dan pendengaran. Dengan begitu, pengguna merasa lebih terhubung dengan platform yang mereka gunakan (MARYONO, 2023).

Meski memberikan kemudahan, *personalized content* juga memiliki tantangan, terutama dalam hal filter bubble dan privasi data. *Filter bubble* membuat pengguna hanya melihat informasi yang sesuai dengan pandangan mereka, sehingga membatasi perspektif baru. Sementara itu, penggunaan data pribadi untuk personalisasi menimbulkan kekhawatiran akan penyalahgunaan atau kebocoran informasi. Oleh karena itu, transparansi dan regulasi menjadi aspek penting dalam pengelolaan konten yang dipersonalisasi.

Kedepan, personalisasi konten diperkirakan semakin canggih dengan bantuan kecerdasan buatan dan analisis data yang lebih mendalam. Pengguna akan mendapatkan pengalaman digital yang lebih interaktif dan relevan dengan preferensi mereka. Namun, keseimbangan antara kenyamanan, keamanan, dan keberagaman informasi tetap harus dijaga. Dengan demikian, personalisasi konten dapat terus berkembang tanpa mengorbankan kebebasan dan privasi pengguna.

- *Engagement Metrics*: Semakin tinggi interaksi (*like*, *share*, *comment*), semakin besar kemungkinan konten muncul di berbagai linimasa.

Engagement metrics adalah indikator utama dalam menilai efektivitas suatu konten di media sosial. Metrik ini mencakup jumlah *like*, *share*, *comment*, dan berbagai bentuk interaksi lainnya yang menunjukkan seberapa banyak pengguna berpartisipasi dengan sebuah postingan. Algoritma platform media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, dan *TikTok* cenderung memprioritaskan konten dengan tingkat interaksi tinggi, karena dianggap lebih relevan bagi audiens yang lebih luas (Muhamad, Nasoha, & Atqiya, 2024).

Semakin tinggi tingkat *engagement*, semakin besar kemungkinan sebuah konten muncul di berbagai linimasa pengguna. Ini terjadi karena algoritma dirancang untuk menampilkan konten yang dianggap menarik atau bermanfaat berdasarkan reaksi pengguna lainnya (Hakim & Yunas, 2024). Konten yang mendapatkan banyak *like* dan komentar biasanya akan muncul lebih sering di feed orang-orang yang memiliki minat serupa, sehingga meningkatkan jangkauan secara organik tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan.

Namun, meningkatkan *engagement* tidak semata-mata soal jumlah interaksi, tetapi juga tentang kualitas interaksi tersebut. Komentar yang panjang dan berbobot cenderung memiliki dampak lebih besar dibandingkan sekadar *like*. Oleh karena itu, strategi seperti mengajukan pertanyaan dalam caption, menggunakan *call-to-action* yang menarik, serta membuat konten yang memancing diskusi bisa membantu meningkatkan keterlibatan audiens dengan lebih efektif.

Dunia digital merupakan dunia yang kompetitif, memahami dan mengoptimalkan *engagement metrics* menjadi kunci keberhasilan dalam pemasaran konten. Dengan menganalisis data interaksi secara rutin, kreator maupun bisnis dapat mengetahui jenis konten yang paling disukai *audiens* mereka. Pada akhirnya, strategi ini dapat membantu membangun komunitas yang lebih aktif, meningkatkan loyalitas, dan mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.

- *Filter Bubble & Echo Chamber*: Pengguna cenderung menerima informasi yang mendukung perspektif mereka, yang dapat memperkuat bias atau polarisasi.

Di era digital, informasi yang kita konsumsi sering kali disaring oleh algoritma, menciptakan *filter bubble* (gelembung saring) yang membatasi sudut pandang kita. Platform seperti media sosial dan mesin pencari menyesuaikan konten berdasarkan preferensi dan riwayat pencarian pengguna. Akibatnya, seseorang cenderung hanya melihat informasi yang sesuai dengan pandangan mereka, tanpa disadari terisolasi dari perspektif lain. Hal ini dapat menghambat pemahaman yang lebih luas terhadap suatu isu, karena hanya satu sisi cerita yang terus diperkuat (Syahputra¹ et al., 2023).

Sementara itu, *echo chamber* (ruang gema) terjadi ketika seseorang hanya berinteraksi dengan individu atau komunitas yang memiliki pandangan serupa. Dalam lingkungan ini, pendapat yang sama terus diperkuat tanpa adanya tantangan dari sudut pandang berbeda. Hal ini bisa memperkuat bias kognitif dan membuat seseorang semakin yakin bahwa perspektif mereka adalah yang paling benar. Pada akhirnya, hal ini dapat memperdalam polarisasi dalam masyarakat, di mana kelompok dengan pandangan berbeda sulit mencapai pemahaman bersama (Djusr et al., 2025).

Dampak dari *filter bubble* dan *echo chamber* sangat nyata dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, sosial, dan budaya. Polarisasi yang ditimbulkan sering kali menyebabkan perpecahan, di mana diskusi rasional digantikan oleh emosi dan fanatisme. Dalam jangka panjang, ini dapat menghambat demokrasi yang sehat, karena masyarakat tidak lagi terbuka terhadap perbedaan pendapat. Jika dibiarkan, individu akan semakin sulit memilah

informasi yang objektif dan cenderung mempercayai narasi yang sesuai dengan keyakinan mereka.

Untuk mengatasi fenomena ini, pengguna perlu secara aktif mencari sumber informasi yang beragam dan berusaha memahami sudut pandang lain (Kurnianto & Abdusshomad, 2024). Mengikuti media dengan berbagai orientasi politik, berpartisipasi dalam diskusi terbuka, serta berpikir kritis terhadap informasi yang diterima adalah beberapa langkah penting. Selain itu, platform digital juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan transparansi algoritma agar pengguna lebih sadar terhadap bagaimana informasi disajikan kepada mereka. Dengan demikian, kita dapat membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berpikiran terbuka.

Dalam konteks Pancasila, algoritma ini dapat membawa dampak positif dan negatif. Di satu sisi, ia dapat mempercepat penyebaran nilai-nilai Pancasila. Namun, di sisi lain, algoritma juga dapat memperkuat polarisasi yang bertentangan dengan prinsip persatuan dan kebhinekaan.

4. KESIMPULAN

Era digital, algoritma media sosial memainkan peran penting dalam membentuk wacana publik, termasuk dalam penyebaran nilai-nilai Pancasila. Algoritma yang mengutamakan keterlibatan pengguna dapat mempercepat distribusi informasi tentang Pancasila, tetapi juga berpotensi memperkuat polarisasi dan menghambat pemahaman yang inklusif. Fenomena *filter bubble* dan *echo chamber* memperlihatkan bagaimana pengguna cenderung terjebak dalam lingkaran informasi yang memperkuat perspektif mereka, sehingga membatasi diskusi yang lebih luas. Untuk memastikan Pancasila tetap relevan di ruang digital, diperlukan upaya literasi digital yang lebih baik serta kebijakan yang mendukung penyebaran konten yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan.

Selain itu, transparansi algoritma dan pengelolaan informasi yang lebih adil dapat membantu mencegah penyalahgunaan media sosial sebagai alat penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Masyarakat perlu secara aktif mencari informasi dari berbagai sumber, terlibat dalam diskusi yang sehat, dan menghindari konsumsi konten yang hanya memperkuat bias pribadi. Pemerintah, akademisi, dan platform digital juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa ruang digital tetap menjadi tempat yang mendukung demokrasi, persatuan, dan kebhinekaan sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Dengan langkah-langkah tersebut, media sosial dapat menjadi alat yang lebih efektif dalam menyebarkan nilai-nilai Pancasila,

memperkuat identitas nasional, serta menciptakan lingkungan digital yang lebih inklusif dan konstruktif bagi seluruh masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Fudholi, L., Rahaningsih, N., & Danar Dana, R. (2024). Sentimen analisis perilaku penggemar Coldplay di media sosial Twitter menggunakan metode Naive Bayes. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 8(3), 4150–4159. <https://doi.org/10.36040/jati.v8i3.9827>
- Abdullah, S., & Basuki, U. J. (2022). Pancasila landasan dasar dalam mewujudkan negara hukum Indonesia. *Prosiding SNasPPM*. <https://eprints.akprind.ac.id/2294/>
- Agustina, A. (2023). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam media sosial pada generasi Z. *JAGADDHITA: Jurnal Kebhinnekaan dan Wawasan Kebangsaan*, 3(1), 11–21. <https://journal.unindra.ac.id/index.php/jagaddhita/article/view/2134>
- Amaries, B. N., Dzikrullah, M. J., & Fauzi, M. A. N. (n.d.). Mempertahankan Pancasila sebagai ideologi di era globalisasi digital. *SEMAYO: Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 2(2), 252–255.
- Anah, P., & Saputra, M. D. (2024). Integrasi kecerdasan buatan dalam penguatan literasi budaya multikultural di lingkungan sekolah. *Prosiding SENDIK FKIP Universitas Peradaban*. <https://journal.peradaban.ac.id/index.php/fkipconference/article/view/2142>
- Atqiya, A. N., Muhamad, A., Nasoha, M., & Rohmawati, A. F. (2024). Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu: Perlunya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat*, 2(4), 57–67.
- Atqiya, A. N., Muhamad, A., Nasoha, M., Ramadhani, A. F., Masfufah, S. A. L., & Alhasitsa, S. H. (2024). Pancasila sebagai ideologi negara: Implementasi nilai-nilai dalam kehidupan nasional dan internasional. *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, 2(2), 12–22.
- Djusrar, S., Zamsuri, A., & Asril, E. (2025). Sosialisasi algoritma kebangsaan guna peningkatan pemahaman nilai-nilai kebangsaan peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Minas. *J-COSCIS: Journal of Computer Science Community Service*, 5(1), 1–11.
- Hakim, A. I., & Yunas, N. S. (2024). Penguatan nilai-nilai Pancasila pada kelompok pemuda dan perempuan di Kampung Pancasila. *Surya Abdimas*, 8(1), 15–23. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v8i1.3448>
- Hardiyanti, H. (2021). Pendidikan karakter berbasis Pancasila: Paparan sejarah ideologi, ideologi Pancasila dan relevansinya di era digital. *PhilPapers*. <https://philpapers.org/rec/HARPKB>
- Jamilah, R., Maya, H. M., & Ariyanto, D. (2024). Implementasi media sosial pada generasi Alpha ditinjau dari nilai-nilai Pancasila di Desa Jeruk Sok-Sok Kecamatan Binakal. *Universitas PGRI Argopuro Jember*, 2(2), 59–66.

- Kurnianto, B., & Abdusshomad, A. (2024). Pancasila dan kebebasan berpendapat: Tantangan dan batasan dalam era digital. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 12(1).
- Legito, L., Riau, N. P., Putro, A. N. S., Mardiani, E., & ... (2023). Penerapan algoritma K-Nearest Neighbor untuk analisis sentimen terhadap isu khilafah dan radikalisme di Indonesia: Implementation K-Nearest Neighbor. *Indonesian Journal of Malcom*. <https://journal.irpi.or.id/index.php/malcom/article/view/893>
- Maliki, I. A. (2024). Artificial intelligence untuk kemanusiaan: Pengembangan konsep keberagaman melalui Chat-GPT sebagai solusi krisis identitas muslim urban di era digital. *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/moderatio/article/view/8913>
- Maryono, M. (2023). Implementasi nilai keharmonisan Bhinneka Tunggal Ika: Pembelajaran bagi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan*, 3(2), 141–146. <https://doi.org/10.51878/knowledge.v3i2.2347>
- Melsya Dwi Putri, Susanti, E., Santri, L., Susanti, N., Ananda, R., & Daimatussalimah. (2024). Analisis dampak perilaku online Gen Z terhadap identitas kewarganegaraan dalam era digital. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 4(2), 211–223. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v4i2.3300>
- Muhamad, A., Nasoha, M., & Atqiya, A. N. (2024). Cyberbullying pada aplikasi TikTok ditinjau dari hukum pidana dan fiqh empat mazhab. *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 10(2), 374–387.
- Muhamad, A., Nasoha, M., Amrulloh, M. F., & Nafi, A. T. (2025). Pancasila sebagai dasar hukum tata negara di Indonesia: Implikasi dan implementasi. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 74–82.
- Muhamad, A., Nasoha, M., Atqiya, A. N., & Widiya, A. A. (2024). Peran Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara dalam dinamika sejarah dan perkembangannya. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, 2(4), 379–395.
- Najmi, M. S., Yapputro, P. A., & Wijanarko, D. (2024). Pancasila dalam era digital: Mengatasi tantangan teknologi dan media sosial terhadap keharmonisan sosial. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 4(1), 175–183. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/view/733>
- Namira, E., Salsabilla, I. M., Rahmadanti, P. P., & Fitriyono, R. A. (2022). Implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman generasi milenial dalam bersikap di media sosial. *Jurnal Intelektiva*, 4(4), 79–87.
- Pratama, G. D. (2024). Analisis isi pesan Islam politik dalam media sosial Instagram @follback.dakwah tahun 2019–2022. *Jurnal Studi Inovasi*. <https://jurnal.studiinovasi.id/jsi/article/view/172>
- Rashid, F. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif: Teori, metode, dan praktek* (1st ed.). IAIN Kediri Press.

- Syahputra, A., Majid Fadhilah, M., Prasetya, G., Pradana, A., Prio, A., & Santoso, A. (2023). Penerapan Pancasila di dalam era digital. *Seminar Nasional & Call For Paper Hubisintek*, 816–827.
- Ulfa, A. M., Jayus, M., Sofiana, A., & Febriani, E. (2024). Berkomunikasi melalui media sosial berbasis nilai moralitas. *Journal of Science and Research*, 5(3), 1–23.
- Virza, M., Nurrahman, A., & Najicha, F. U. (2024). Dampak kehadiran artificial intelligence terhadap penegakan nilai-nilai Pancasila di Indonesia. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 12(1), 32–38. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/CIVICUS/article/view/16085>